

# Perilaku Penyimpangan Nelayan Dalam Proses Penangkapan Ikan di Desa Waeura, Pulau Buru

Jul Untung Papalia<sup>1</sup>, Suparman Abdullah<sup>2</sup>, Sakaria<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Hasanuddin; [jul.nursadi@gmail.com](mailto:jul.nursadi@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Hasanuddin; [suparmanabdullah@gmail.com](mailto:suparmanabdullah@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Hasanuddin; [sakaria@unhas.ac.id](mailto:sakaria@unhas.ac.id)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan perilaku penyimpangan illegal fishing penggunaan bom dan racun ikan yang terjadi di Desa Waeura. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami proses, penyebab, dan dampak yang timbul dari perilaku tersebut. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam, focus group discussion, dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan illegal fishing terus berlangsung di Desa Waeura, yang dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat fenomena pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pihak yang seharusnya berperan sebagai pengontrol terhadap perilaku illegal fishing. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran akan konsekuensi berkelanjutan dari praktik illegal fishing. Ketiga, lemahnya komunikasi antara pihak berwenang dan masyarakat menjadi faktor yang mempersulit upaya pencegahan terhadap perilaku penyimpangan illegal fishing.

**Kata Kunci:** Nelayan; Bom; Racun Ikan

DOI: <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.228>

\*Correspondensi: Jul Untung Papalia

Email: [jul.nursadi@gmail.com](mailto:jul.nursadi@gmail.com)

Received: 05-6-2024

Accepted: 13-6-2024

Published: 06-10-2024



**Copyright:** © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract.** This research aims to identify and elucidate the deviant behaviors of illegal fishing, including the use of bombs and fish toxins, occurring in the village of Waeura. The study also seeks to comprehend the processes, causes, and impacts resulting from these behaviors. The research methodology involves in-depth interviews, focus group discussions, and observations as data collection techniques. The findings indicate that illegal fishing deviant behaviors persist in Waeura Village, triggered by several factors. Firstly, there is a phenomenon of negligence among the community, who should play a role as controllers against illegal fishing practices. Secondly, the low level of education in the community leads to a lack of awareness regarding the sustainable consequences of illegal fishing practices. Thirdly, weak communication between authorities and the community hinders efforts to prevent deviant behaviors related to illegal fishing.

**Keywords:** Fisherman; Bomb; Fish Poison

## Pendahuluan

Perilaku menyimpang illegal fishing dengan menggunakan bom dan racun masih sering terjadi dikalangan nelayan, khususnya nelayan di Kepulauan Pasifik, Asia Tenggara dan Afrika yang masih menggunakan cara-cara tersebut sebagai pilihan utama, tanpa memperdulikan kehancuran ekosistem laut dan berbagai

---

macam biota laut yang berada di dalamnya (Making Dkk., 2022). Hal ini tentunya mempunyai dampak jangka panjang, bukan hanya pada lingkungan semata tapi akan berdampak pada faktor ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya kepada hasil laut (Siburian Dkk., 2023).

Potret kehancuran ekosistem laut yang disebabkan oleh perilaku menyimpang illegal fishing telah banyak terjadi di seluruh laut Indonesia (Mahmudah, 2022). Praktik ini telah mendapatkan perhatian utama dari para peneliti baik didalam maupun luar negeri. Menurut Puspito bahwa kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh perilaku menyimpang illegal fishing di Indonesia diperkirakan mencapai 75% (Asri Dkk., 2019).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 114 tahun 2019 perilaku menyimpang illegal fishing adalah aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat dan atau cara merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, Setrum dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan (KKP, 2019). Dari pengamatan Pet-Soede et al (2000), diperkirakan bahwa jangkauan ledakan bom yang dikemas menggunakan botol bir mencapai 5 m<sup>2</sup>, untuk mengetahui penggunaan bom tersebut ditandai dengan pecahannya yang tersebar di sekitar terumbu karang (Puspito, 2010). Selain itu penggunaan racun ikan membuat kerusakan permanen pada terumbu karang, sekaligus membunuh larva dan ikan-ikan kecil.

Kerusakan ekosistem laut di perairan Maluku yang sudah berlangsung cukup lama, dapat memberikan dampak serius pada masa depan nelayan sekitar. Meskipun perairan Maluku memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, dengan estimasi sekitar 4,67 juta ton (Dinas KKP Maluku, 2021) dan kuota penangkapan yang diizinkan sebesar 3,735 juta ton, kontribusinya terhadap sumber daya ikan nasional mencapai 30% (Kepmen KP No. 50,2017). Namun, jika tidak dijaga dengan maksimal, potensi ini dapat terancam, mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.

Kabar buruk ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem laut Maluku, tetapi juga dapat memperpanjang masalah yang ada. Nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan dari perairan tersebut akan mengalami kesulitan ekonomi dan sosial karena menurunnya jumlah ikan yang dapat mereka tangkap (Harahap Dkk., 2019). Selain itu, jika ekosistem laut terus mengalami kerusakan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan laut secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok nelayan setempat, terungkap bahwa perilaku penyimpangan illegal fishing telah mengalami penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Namun, disadari bahwa praktik tersebut masih terus berlangsung di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh hukum dan pengawasan Pemerintah. Desa Waeura, yang terletak di perairan Maluku, menjadi salah satu contoh kasus di mana perilaku penyimpangan illegal fishing masih terjadi. faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya intervensi pemerintah dan lemahnya kontrol sosial oleh masyarakat sekitar. Kondisi ini

memberikan celah bagi sejumlah oknum nelayan untuk memanfaatkannya dengan melakukan praktik perilaku penyimpangan illegal fishing, termasuk penggunaan bom dan racun ikan yang menjadi hal umum dilakukan.

Dampak dari perilaku penyimpangan illegal fishing dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat Desa Waeura, khususnya yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Sejumlah masalah yang berdampak pada kegiatan perikanan seperti yang sudah dijelaskan di atas, menjadi landasan penting untuk ditelaah lebih mendalam dengan tujuan mengetahui proses, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perilaku penyimpangan illegal fishing di Desa Waeura.

## Metode

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2023 di Desa Waeura Pulau Buru yang merupakan bagian dari perairan Maluku. Pemilihan lokasi tersebut karna perilaku penyimpangan illegal fishing dengan cara bom dan racun ikan, masih dianggap lumrah oleh masyarakat yang terkesan dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengontrol secara sosial dan lemahnya intervensi pemerintah menjadi alasan peneliti untuk mendalami masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2010). Data primer dikumpulkan dari beberapa hasil wawancara mendalam yang melibatkan 10 informan kunci untuk mendeskripsikan perilaku penyimpangan illegal fishing di Desa Waeura. Kemudian data primer yang ada di perkaya dengan data sekunder yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) menggunakan teknik bola salju (*Snowball Sampling*) (Moleong, 2005).

## Hasil dan Pembahasan

### a. Kondisi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Desa Waeura

Desa waeura terletak di Pulau Buru, yang merupakan bagian dari kepulauan Maluku. Desa ini berada diantara dua desa tetangga, yaitu Desa Samalagi di sebelah barat dan desa Waplau di sebelah timur. di Selatan Desa Waeura, terdapat daerah pegunungan, sedangkan di sebelah utara, desa ini berbatasan langsung dengan laut. Mayoritas penduduk desa waeura merupakan pendatang dari suku Buton dan Galela. Selain itu, ada juga penduduk dari suku lain seperti Jawa, Bugis, Sula, serta masyarakat asli Buru, meskipun jumlah mereka relatif lebih sedikit. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat desa waeura adalah bahasa maluku.

Secara historis Desa Waeura merupakan tempat yang dihuni oleh masyarakat dari suku Buton, yang melakukan pelayaran dari Sulawesi Tenggara. Masyarakat tersebut secara umum tinggal di wilayah bagian timur yang sering disebut sebagai *Kabong Cina*. Kehidupan sehari-hari mereka masih sangat bergantung pada kegiatan di laut (nelayan) dan hasil pertanian sebagai sumber utama untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, suku Galela, yang berasal dari Maluku Utara, khususnya Pulau Halmahera, mulai berdatangan ke wilayah pesisir Pulau Buru. Mereka datang dalam jumlah besar karena bertugas sebagai prajurit Ternate, yang

sering disebut dengan istilah kora-kora (Patty, 2017). Karena berbagai alasan yang membuat mereka tidak dapat kembali ke tempat asal, kebanyakan dari mereka akhirnya tersebar di seluruh pesisir Pulau Buru dan sebagian menetap di bagian barat desa waeura. Hingga tahun 1927, dusun waeura terbentuk sebagai bagian dari Desa Samalagi (Buton, 2012). Kemudian, pada tahun 1955, Waeura meraih kemandirian penuh sebagai sebuah desa yang mandiri (Buton, 2023).

Sebagai salah satu desa pesisir yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, rasa kekeluargaan diantara warga desa waeura sangatlah kuat, dengan nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi di antara mereka. Sikap gotong royong dan saling menolong antar sesama menjadi ciri khas masyarakat desa ini, yang tetap aktif melibatkan diri dalam berbagai aktivitas sosial secara bersama-sama.

Akan tetapi, kesadaran akan pentingnya pendidikan di masyarakat desa waeura baru mulai terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. fenomena ini menjadi begitu menonjol ketika mengamati angkatan pertama, kedua dan ketiga dari generasi yang tinggal di desa tersebut. Dalam perspektif mereka, hal-hal yang sekarang dianggap penting oleh masyarakat, mungkin tidak begitu dianggap serius pada masa itu. Hasilnya, mayoritas penduduk desa tidak menempuh pendidikan sama sekali, hanya sebagian kecil menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kondisi ini dapat diperkuat dengan melihat data sebagai berikut:

| Tingkat Pendidikan | Jml Penduduk | Presentase |
|--------------------|--------------|------------|
| Tidak Sekolah      | 1.068        | 67.5%      |
| TK                 | 58           | 3.7%       |
| SD                 | 109          | 6.9%       |
| SMP                | 113          | 7.1%       |
| SMA                | 126          | 8.0%       |
| D1-D3              | 12           | 0.8%       |
| S1                 | 40           | 2.5%       |
| S2                 | 2            | 0.1%       |
| Jumlah             | 1.582        | 100.0%     |

Sumber : Data Desa Waeura

Secara umum, masyarakat nelayan di desa waeura menunjukkan pola sosial yang sangat egaliter. Tidak terdapat pembagian struktur yang jelas seperti yang umumnya terjadi di daerah-daerah lain, yaitu antara punggawa dan sawi. Proses aktivitas nelayan cenderung bersifat mandiri dan tidak tergantung pada unsur-unsur lainnya.

Dalam konteks ini, nelayan di desa waeura dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe utama, masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda. Pertama, terdapat nelayan tuna yang fokus pencarian ikan cenderung lebih ke laut dalam dengan menggantungkan hidupmu secara penuh dari pendapatan hasil laut. Kedua, nelayan yang menggunakan jaring sebagai metode menangkap ikan, mereka cenderung beroperasi di saat-saat tertentu ketika gerombolan ikan mendekati ke tepian pantai, dan rata-rata dari mereka punya mata pencaharian lain. Selanjutnya adalah nelayan pancing ulur (*hand line*) yang menggunakan sampang dan nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan dengan panah (*spear gun*). Kebanyakan dari mereka adalah petani yang melakukan pekerjaan sampingan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan dapurinya, hal ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup mereka dan sebagai penyokong ekonomi keluarga.

### **b. Akar Masalah Penggunaan Bom dan Racun Ikan di Desa Waeura**

#### **Penggunaan Bom di Desa Waeura**

Penggunaan bom di desa waeura mulai dikenal pada masa konflik tahun 1999. Pada periode tersebut, pengetahuan tentang perakitan bom tersebar luas di masyarakat, di mana sebagian besar individu menggunakan metode ini sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari potensi serangan musuh. Namun, setelah berakhirnya konflik, sisa-sisa bom yang dihasilkan dari pertempuran tersebut masih tersimpan dengan rapi di rumah-rumah warga. Fenomena ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian nelayan untuk menggunakan bom sebagai alat menangkap ikan.

Ketersediaan bahan baku pembuatan bom ikan biasanya diperoleh dari Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung. Fenomena ini dapat terjadi karena jalur perdagangan pada waktu itu mengarah ke Kota Bitung dengan menggunakan kapal pinisi yang beroperasi antara Kota Bitung dan desa-desa di pesisir Pulau Buru, salah satunya desa waeura yang tujuannya adalah mengangkut hasil alam (kopra) untuk dijual. Kemudian, dari hasil penjualan tersebut dimanfaatkan oleh pedagang untuk membeli bahan baku pembuatan bom yaitu pupuk ilegal bermerek "M" yang mengandung sekitar 34,50% amonium nitrat (Asri Dkk., 2019).

Dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2009, terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas penggunaan bom di desa waeura. Praktik ini terutama dilakukan oleh para nelayan sebagai respon terhadap meningkatnya hasil tangkapan ikan yang dianggap sangat menguntungkan. Fenomena ini dianggap lumrah dan dilakukan secara terang-terangan di masyarakat. Bahkan, metode penangkapan ikan menggunakan bom menjadi suatu kebiasaan yang terintegrasi dalam acara hajatan pernikahan, di mana pasokan ikan selalu diperoleh melalui cara tersebut.

Aktivitas nelayan yang menggunakan bom umumnya terjadi pada waktu-waktu tertentu, yakni pada saat teramati adanya konsentrasi kelompok ikan di sekitar wilayah pesisir. Penempatan bahan peledak dilakukan sedemikian rupa sehingga gelombang suara yang dihasilkan dapat merambat hingga mencapai

seluruh desa, hal ini memancing mobilisasi masyarakat untuk bergegas ke pantai dengan tujuan mengumpulkan ikan yang terdampak oleh detonasi tersebut. Fenomena ini berlangsung dalam kurun waktu yang begitu lama, namun mulai menemui kendala ketika pihak Kepolisian memberlakukan larangan dan ancaman pidana terhadap praktik tersebut. Akibatnya, Aktivitas ini kemudian berlangsung ke pola operasi klandestin dengan intensitas ledakan yang lebih minim dibandingkan sebelumnya.

Dengan diberlakukannya larangan tersebut, terjadi perubahan paradigma di masyarakat yang awalnya mendukung menjadi lebih berhati-hati dan enggan terlibat secara aktif dalam kegiatan illegal fishing. Meskipun demikian, perilaku tersebut masih tetap dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak adanya pengawasan dari masyarakat. Ketika aparat penegak hukum datang dan melakukan penyelidikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di Desa, masyarakat cenderung enggan memberikan informasi dan mencoba menyembunyikan segala bentuk pelanggaran dengan alasan menjaga hubungan kekerabatan di antara sesama warga desa.

Penegakan hukum terhadap pelaku praktik illegal fishing sering menghadapi tantangan yang signifikan. Keterbatasan informasi dari masyarakat dan kekurangan bukti yang memadai sering menghambat upaya aparat penegak hukum untuk mengadili mereka. Dalam konteks perikanan destruktif, kesulitan ini tidak hanya menciptakan ketidakjelasan hukum, tetapi juga merangsang persistensi eksploitasi alam yang meluas dan tersembunyi. Kurangnya sinergitas antara lembaga otoritas dan masyarakat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk mengelak dari proses hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kontrol perilaku destruktif semakin memperparah situasi ini. Terlebih lagi, tidak adanya komunikasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum memberikan rasa perlindungan bagi para pelaku perikanan destruktif. Keadaan ini, secara keseluruhan, memberikan hambatan serius dalam upaya memberikan efek jera dan efektivitas penegak hukum terhadap praktik illegal fishing.

### **c. Penggunaan Racun ikan Di Desa Waeura**

Masyarakat di desa waeura telah lama mempraktekkan penggunaan racun ikan secara tradisional dengan memanfaatkan akar tuba yang mengandung senyawa aktif bernama rotenone ( $C_{23}H_{22}O_6$ ). Proses penggunaannya melibatkan penumpukan akar tuba, yang kemudian dilarutkan ke dalam air untuk menghasilkan larutan rotenone. Senyawa rotenone tersebut memiliki kemampuan menghambat proses respirasi sel. Ikan yang terpapar rotenone akan mengalami kesulitan bernafas karena sel saraf dan sel ototnya mengalami kerusakan (Puspito Dkk., 2023). Kegiatan ini umumnya dilakukan pada saat air surut, ketika karang-karang di tepian pantai mulai terlihat dan banyak ikan yang terjebak diantara kerangka. Masyarakat memanfaatkan kondisi ini untuk menangkap ikan dengan menggunakan racun yang berasal dari tumbuhan menjalar tersebut.

Kegiatan ini berlanjut ke perairan laut yang lebih dalam karena nelayan memperoleh manfaat dari pendekatan ini, di mana penangkapan ikan menjadi lebih terjamin dan memenuhi standar ukuran yang diinginkan. Para nelayan mengaplikasikan metode ini dengan cara menyemprotkan racun ikan ke karang-karang di dasar laut, khususnya ketika terdapat target ikan besar di dalam. Sayangnya, aktivitas ini dilakukan tanpa adanya pengawasan dan kontrol dari pihak masyarakat yang dibiarkan terus-menerus.

Secara perlahan, masyarakat nelayan mulai familiar dengan penggunaan racun ikan yang lebih modern, khususnya potasium sianida, serta mengadopsi alat menyelam yang lebih efisien, yakni penggunaan kompresor. Fenomena ini telah merangsang peningkatan signifikan dalam aktivitas penangkapan ikan melalui metode racun yang kini menjadi lebih masif dan meluas. Penggunaan potasium sebagai racun menawarkan variasi dan diversifikasi target ikan yang diinginkan oleh nelayan, menggantikan metode konvensional yang cenderung lambat dan menghasilkan hasil yang kurang signifikan jika dibandingkan dengan cara konvensional yang digunakan saat ini.

Nelayan umumnya memanfaatkan racun yang berasal dari agen kimia yang tersedia di pasar pertanian, seperti pestisida atau herbisida, yang dengan mudah diperoleh dari tempat-tempat penjualan pupuk dan obat-obatan pertanian dan harganya relatif terjangkau. Racun-racun tersebut, seperti potasium sianida, biasanya digunakan oleh petani untuk memerangi hama pada tanaman mereka. Dalam kandungannya, racun ini mengandung zat yang dapat secara cepat mengakibatkan kematian ikan dalam waktu singkat setelah terpapar.

#### **d. Dampak Dari Perilaku Penyimpangan Penggunaan Bom dan Racun ikan Dampak Terhadap Lingkungan**

Penggunaan bom dan racun ikan (Potasium sianida) merupakan kegiatan nelayan yang menyebabkan kerusakan serius terhadap lingkungan laut. Dampak negatif dari aktivitas ini termanifestasikan dalam membentuk berbagai zat berbahaya yang secara signifikan mempengaruhi ekosistem laut. Penggunaan bom, misalnya, dapat menyebabkan kerusakan fisik pada struktur terumbu karang dan habitat laut lainnya, merusak lingkungan hidup organisme perairan. Sementara itu, penggunaan Potasium sianida, baik yang disuntikan langsung ke dalam karang atau menggunakan metode penangkapan ikan tertentu, dapat meracuni organisme non target dan secara serius mengganggu rantai makanan.

Dampak dari penggunaan bom dan potasium sianida menyebabkan degradasi yang signifikan terhadap ekosistem terumbu karang di desa waeura. Dimana, lokasi-lokasi yang semula memukau dengan beragam terumbu karangnya saat ini mengalami kerusakan permanen, di mana terumbu karang yang dulunya beraneka ragam kini hanya menyisahkan gundukan pasir tanpa keberadaan karang yang tampak. Kondisi ini menunjukkan tingkat kematian yang serius terhadap ekosistem terumbu karang. Selain itu, spesies ikan yang pada masa sebelumnya dapat ditemukan dengan mudah seperti ikan kerapu tikus, kakap merah, Napoleon,

baronang, dan ekor kuning, saat ini telah mengalami penurunan populasi yang signifikan bahkan sangat langka untuk didapatkan.

Dengan kerusakan yang signifikan pada ekosistem terumbu karang di desa waeura, fenomena abrasi pantai menunjukkan peningkatan yang sangat jelas selama dua dekade terakhir. Hasil dari wawancara dengan penduduk sekitar mengindikasikan bahwa selama kurang waktu tersebut, garis pantai telah mengalami erosi sekitar 20 meter akibat pengaruh air laut. Dampak dari itu memaksa pembangunan tanggul laut sebagai upaya penghalang terhadap intrusi air laut, sebagai solusi untuk melindungi properti permukiman warga dari risiko erosi pantai.

#### **e. Dampak Terhadap Ekonomi**

Selain permasalahan lingkungan, penggunaan bom dan racun ikan pada kegiatan perikanan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi masyarakat. Dampak ini dapat diidentifikasi dengan pendapatan nelayan yang akan mengalami penurunan. Sebagaimana yang dikatakan Pet-Soeda *et al* (1999) bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kerusakan terumbu karang dalam jangka panjang mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat per km<sup>2</sup> (Asri Dkk., 2019).

Dampak ekonomi yang timbul dari penggunaan bom dan racun ikan di desa waeura dapat diamati melalui perubahan dalam jarak tangkap nelayan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas nelayan kecil di desa waeura, yang mengadopsi teknologi penangkapan ikan sederhana dengan wilayah operasi kurang dari 4 mil, kini mengalami kesulitan dalam mendapatkan tangkapan ikan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Menurut para nelayan, keberadaan ikan menjadi semakin sulit diperkirakan pergerakannya, di mana lokasi-lokasi yang sebelumnya menjadi tempat berkumpulnya ikan kini mengalami penurunan drastis.

Selain itu, melalui implementasi pembangunan tanggul laut, akses nelayan terhadap laut mengalami pembatasan yang menghambat pertumbuhan populasi nelayan. Adanya tanggul tersebut menyebabkan keterbatasan lokasi yang dapat dimanfaatkan nelayan untuk mengamankan perahu mereka dari dampak ombak selama musim badai atau cuaca buruk. Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan, terungkap bahwa dalam dua dekade terakhir ini terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah individu yang memilih profesi sebagai nelayan. Sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan dalam mencari tempat yang aman untuk berlabuh perahu mereka.

#### **f. Dampak Terhadap Diri/jiwa**

Daya ledak bom serta zat berbahaya yang terkandung di dalam potasium sianida dapat menyebabkan dampak yang fatal pada berbagai bentuk kehidupan, termasuk manusia (Sembel, 2015). Berdasarkan hasil wawancara, terdapat serangkaian peristiwa kecelakaan yang terjadi pada periode tahun 2000-2009, yakni lebih dari 5 korban yang mengalami cacat permanen akibat dari penggunaan bom



ikan. Sedangkan pada tahun 2022, dilaporkan bahwa terdapat 1 korban yang mengalami cacat permanen akibat penggunaan bom, yakni kehilangan tangan dan kebutaan. Selain itu, satu kejadian keracunan ikan yang disebabkan oleh penggunaan potasium sianida juga tercatat, dengan korban yang langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat.

Sejauh penggunaan bahan peledak dan racun ikan di desa waeura, tidak ada catatan kasus kematian yang terjadi. Perspektif nelayan terhadap kecelakaan yang melibatkan penggunaan bahan peledak dan racun ikan menyatakan bahwa korban-korban tersebut dapat dikaitkan dengan kelalaian pribadi dan sejauh mana pengalaman masing-masing nelayan. Pemahaman ini menjadi motivasi bagi nelayan untuk terus melibatkan diri dalam praktik destruktif tersebut. Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan nelayan juga menjadi indikator kurangnya kesadaran terhadap aspek keselamatan pribadi yang terkait dengan penggunaan bahan peledak dan racun ikan.

Ketidakberlanjutan pengawasan masyarakat dan minimnya intervensi pemerintah telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam pelaksanaan aktivitas illegal fishing. Kondisi ini muncul karena nelayan merasa tidak terancam akan ditangkap dan dikenai sanksi hukuman atau diisolasi dari lingkungan masyarakat. Selain itu, kurangnya efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama. Tidak adanya pelaporan oleh masyarakat terhadap otoritas berwenang, dan kurangnya pendekatan yang holistik dari pihak pemerintah turut memperpanjang permasalahan tanpa adanya resolusi yang tuntas.

#### **g. Penanganan Perilaku Penyimpangan Penggunaan Bom dan Racun Ikan**

Isu mengenai perubahan ekosistem dan penurunan kualitas lingkungan merupakan tantangan serius bagi komunitas masyarakat pesisir, khususnya mereka yang sangat bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka. Fahrunnisa menyatakan bahwa memahami permasalahan di komunitas pesisir tidak boleh terbatas pada isu-isu kelautan; sebaliknya, perhatian juga harus diberikan pada kegiatan ekonomi non maritim dalam masyarakat tersebut (Abubakar, tanpa tahun;7(2): 443936). Dengan kata lain, permasalahan ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat pesisir yang berkontribusi signifikan terhadap permasalahan ekosistem terumbu karang. Pendekatan dalam penyelesaian permasalahan ini juga harus holistik, mengintegrasikan pendekatan "*Top-Down*" dan "*Bottom-Up*" dan tidak dapat disederhanakan hanya dengan pendekatan :"*Top-Down*" tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Hingga saat ini, otoritas yang berwenang telah mengeluarkan serangkaian peringatan kepada masyarakat untuk menghentikan praktik penyimpangan dalam sektor penangkapan ikan ilegal (*Illegal fishing*). Dampak dari peringatan tersebut terlihat dalam penurunan aktivitas illegal fishing yang sebelumnya dilakukan oleh nelayan secara terang-terangan. Fenomena ini berkontribusi positif terhadap

keberlanjutan ekosistem terumbu karang yang masih tersisa, serta mengurangi intensitas praktik illegal fishing agar tidak semakin meluas. Namun, dari hasil wawancara, diketahui bahwa implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang belum optimal. Kelemahan ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat komunikasi antara pihak berwenang dan masyarakat setempat, yang seharusnya merupakan elemen kontrol terhadap perilaku penyimpangan dalam praktik illegal fishing.

Oleh karena itu, konsistensi dalam menjalankan proses penyadartahuan menjadi suatu aspek yang esensial, baik oleh lembaga pemerintah, LSM, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Implementasi strategi seperti sosialisasi, kampanye dan edukasi merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan. Pentingnya pendekatan ini terletak pada upaya penyampaian pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko dari tindakan penyimpangan ini, khususnya dalam konteks illegal fishing, yang berpotensi memberikan dampak merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Pemahaman ini diarahkan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang konsekuensi penurunan kualitas lingkungan, kemerosotan ekonomi masyarakat dan perubahan tipologi wilayah pesisir yang bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam rangka mencapai kesuksesan program tersebut, peningkatan kapasitas para penyuluh dan partisipasi tokoh masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak dapat diabaikan.

Selain proses penyadartahuan, revitalisasi terumbu karang yang melibatkan pelaku praktik illegal fishing memiliki signifikansi yang substansial, mengingat partisipasi mereka dapat menciptakan rasa kepemilikan terhadap upaya konservasi, terutama ketika mereka menyaksikan berkembangnya terumbu karang dan dedikasi mereka dalam menjalankan program tersebut. Keterlibatan mereka dalam langkah-langkah revitalisasi bukan hanya sebagai langkah pencegahan terhadap aktivitas illegal fishing, melainkan juga sebagai inisiatif untuk mengubah paradigma mereka menjadi agen pemeliharaan ekosistem terumbu karang. Keberhasilan program revitalisasi terumbu karang memegang peran kunci dalam membangun kepercayaan pelaku illegal fishing, yang pada gilirannya dapat membentuk sikap yang berkomitmen terhadap pelestarian dan pemeliharaan terumbu karang. Dengan demikian, proses ini bukan sekedar transformasi fisik, tetapi juga transisi nilai-nilai yang mendorong pelaku illegal fishing untuk beralih dari perilaku merusak menjadi pihak yang berkontribusi positif terhadap keberlanjutan ekosistem laut.

Konsumsi ikan segar oleh masyarakat umumnya dipasok oleh perusahaan di desa Waplau dan nelayan yang beroperasi di Kecamatan Airbuaya. Fenomena ini terjadi seiring dengan menurunnya jumlah populasi nelayan, yang secara signifikan terpengaruh oleh pembangunan tanggul yang menghalangi akses mereka ke laut. Permasalahan ini muncul karena absennya pembangunan wilayah khusus yang dapat difungsikan oleh para nelayan untuk menyimpan dan melindungi perahu mereka. Maka dari itu, pembangunan wilayah khusus sebagai fasilitas peningkatan keamanan perahu bagi nelayan memiliki signifikansi yang besar. Dengan adanya

lokasi tersebut, ketika nelayan kembali dari kegiatan penangkapan ikan, masyarakat dapat berkumpul di tempat tersebut untuk memperoleh hasil tangkapan secara efisien. Hal ini mengoptimalkan aksesibilitas masyarakat desa terhadap hasil tangkap yang baru diambil oleh nelayan. Selain itu, Wilayah khusus ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perahu nelayan dari potensi ancaman gelombang laut yang akan terjadi selama musim cuaca buruk. Dengan demikian, diharapkan fasilitas ini dapat mendorong pertumbuhan populasi nelayan dan mengatasi penurunan profesi nelayan yang sedang dialami saat ini.

Rusaknya terumbu karang, yang berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan penurunan populasi nelayan sebagai konsekuensi dari pembangunan tanggul, merupakan permasalahan yang sangat serius dan memerlukan perhatian bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM dan lembaga terkait. Aspek yang esensial dalam penanganan masalah ini adalah partisipasi aktif dari komunitas kepemudaan, yang dapat menjadi sumber energi positif untuk mengintegrasikan upaya kolaboratif dari berbagai *stakeholder* tanpa adanya kepentingan yang dapat merugikan keberlanjutan sistem kemasyarakatan. Hal ini diperlukan guna memastikan pelestarian lingkungan laut dan ekosistem sebagai elemen krusial dalam mendukung keberlanjutan secara keseluruhan.

### **Kesimpulan**

Praktik perilaku penyimpangan dalam bentuk illegal fishing yang terjadi di Desa Waeura menunjukkan adanya akar penyebab yang bermula dari konflik pada tahun 1999, yang berakhir dengan persebaran bahan baku pembuatan bom. Bahan-bahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para nelayan sebagai alat penangkapan ikan. Selain itu, penggunaan racun ikan yang bersumber dari tanaman tuba juga menjadi fenomena yang dapat dikaitkan dengan pengetahuan tradisional setempat. Praktik-praktik ini terus berlangsung, sebagian besar disebabkan oleh pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat, yang seharusnya memiliki peran sebagai faktor pengontrol terhadap perilaku penyimpangan illegal fishing tersebut. Penting untuk dicatat bahwa latar belakang pendidikan masyarakat menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena ini.

Kerjasama antara pihak-pihak yang terkait menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan guna menekan perilaku penyimpangan illegal fishing. Revitalisasi terumbu karang yang melibatkan para pelaku praktik Illegal fishing menjadi sesuatu yang harus dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mencegah praktik itu terus terjadi. Pentingnya membangun kawasan khusus untuk perahu nelayan sebagai upaya mitigasi terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh ombak pada periode cuaca ekstrem tidak dapat diabaikan. Hal ini menjadi krusial dalam konteks pelestarian populasi nelayan, terutama mengingat dampak negatif dari pembangunan tanggul laut yang dapat menghambat akses nelayan antara wilayah laut dan daratan.

---

**Daftar Pustaka**

- Abubakar, M. M. "Analisis Perubahan Ekosistem Kawasan Pesisir Pulau Sabang." *Jurnal Analisa Sosiologi* 7.2: 443936.
- Asri, Muh, Ekawati Sri Wahyuni, and Arif Satria. "Praktik Perikanan Destruktif (Studi Kasus Pada Taman Nasional Taka Bonerate)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 7.1 (2019): 25-33.
- Buton, Abdul Basari. Doktrinisasi Masyarakat Adat Buton Dalam Kemenangan Pilkada Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Waeura Kec. Waplau Kab. Buru Prov. Maluku). Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2012.
- Buton, Lilis. Peran Petani Bawang Merah dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Waeura Kecamatan Waplau Kabupaten Buru). Diss. Iain Ambon, 2023.
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar
- Dinas KKP Maluku. (2021). Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku.
- Hisyam, Ciek Julyati, and M. Si MM. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara, 2021.
- Harahap, Anita. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kota Sibolga. Diss. Unimed, 2019.
- Kepmen KP No. 50. (2017). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-Kp/2017 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-Kp/2017, 6.
- KKP. 2019. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.114/Kepmen-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak tahun 2019-2023.
- Making, Agustinus Mariano Hurek, Budhi Gunawan, and Muhammad Fadhil Nurdin. "Reifikasi dalam Praktik Penangkapan Ikan Destruktif di Pulau Lembata." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6.1 (2022): 46-61.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID). PT. Remaja Rosdakarya
- Norton-Kyshe, James William. "The history of the laws and courts of Hong Kong from the earliest period to 1898." (No Title) (1898).
- Patty, Febby Nancy. "Resensi Buku: The World of Maluku-Eastern Indonesia in Early Modern Period." *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 3.1 (2017): 87-108.
- Puspito, Gondo. *Pembius ikan*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, 2010.

- 
- Puspito, Gondo, Hani Dwi Wijayanti, and Fis Purwangka. "Konsentrasi Ekstrak Akar Tuba (*Derris elliptica*) Sebagai Racun Patin (*Pangasius pangasius*)." *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 7.1 (2023): 209-219.
- Royani, Ferawati, and Widya Timur. "Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6.1 (2021): 39-48.
- Sembel, Dantje T. *Toksikologi lingkungan*. Penerbit Andi, 2015.
- Siahaan, Sulastri BR, and Monica Margareth. "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok." *Anomie* 1.1 (2019).
- Siburian, Robert, and Masyhuri Imron, eds. *Memberdayakan yang Tertinggal: Problematika Masyarakat Pesisir dan Sekitar Hutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.